



Dewan Minta Penegak Hukum Memeriksanya

Proyek Pelang-Batu Tajam tak Rampung

KETAPANG – Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Ketapang di tahun 2019 ini tak mampu diselesaikan oleh pihak pelaksana. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan ruas jalan Pelang – Batu Tajam senilai Rp56 miliar oleh PT. Marga Mulia. Pengerjaannya hanya rampung sekitar 70 persen. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, kontraktor mengajukan waktu tambahan hingga 50 hari.

Proyek pembangunan Pelang – Batu Tajam memang mendapatkan sorotan sejak beberapa waktu lalu. Mulai dari kualitas pekerjaan hingga waktu pengerjaan yang dinilai sangat lamban. Padahal, proyek tersebut telah dimulai sekitar Juli 2019, namun pihak kontraktor beralasan ada beberapa kendala yang dihadapi. Mereka juga menyalahkan musim hujan yang datang sebelum pekerjaan selesai.

Tenaga Operasional PT. Marga Mulia, Kiryono membenarkan jika pembangunan ruas jalan Pelang – Batu Tajam tidak selesai hingga batas waktu kontrak yang telah ditentukan. Hal tersebut diakui pihaknya karena banyak persoalan atau kendala selama proses pengerjaan, mulai dari cuaca hingga tekstur dasar jalan yang dibangun. “Kendala kita banyak seperti, faktor alam, dasar jalan yang merupakan gambut dan lainnya,” katanya, kemarin (30/12) di Ketapang.

Untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihaknya pun saat ini sedang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Dinas PUTR Ketapang. “Kami sudah rapat dengan Dinas PU, (di mana) saat ini kami sedang melengkapi administrasi untuk permohonan pengajuan perpanjangan waktu tambahan. Yang kami ajukan selama 40 – 50 hari ke depan,” jelasnya.

Atas keterlambatan penyelesaian proyek tersebut, pihaknya siap menerima konsekuensi apapun yang akan diberikan. Mereka siap jika harus didenda selama proses perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan yang terjadi pada jalan yang baru dibangun. “Untuk yang rusak-rusak akan kita perbaiki kem-

bali. Yang jelas kita siap menerima konsekuensi apapun dan siap bertanggung jawab,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Abdul Sani, mengaku kecewa dengan pihak pelaksana proyek tersebut. Menurutnya, proyek tersebut adalah proyek terbesar di tahun 2019, yang bersumber dari APBD Ketapang. Namun, dia menyayangkan, mega proyek tersebut justru tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh pihak pelaksana. Dia menilai pelaksana telah gagal memenuhi tanggung jawab selaku pemenang lelang proyek.

“Kontrak kerja sudah habis, namun pelaksanaan di lapangan baru mencapai 70 persen, artinya proyek tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan dan bisa dikatakan pelaksana gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan proyek tersebut,” katanya, kemarin (30/12).

Seharusnya, kata Sani, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, harus berani dan tegas untuk memberikan sanksi kepada pelaksana yang dianggap lalai. Hal itu, menurut dia, selain merugikan pemerintah, juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. “Harusnya tidak ada lagi perpanjangan, kalau tak selesai dibayarkan sesuai yang dikerjakan saja. Pelaksana juga dikasi sanksi berupa peringatan hingga blacklist, apalagi tahun 2019 sudah tutup,” ujarnya.

Menurutnya, jika Dinas PUTR masih memberikan waktu perpanjangan kepada pihak pelaksana, seolah-olah pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaksana. Padahal, ditegaskan dia, sudah jelas, waktu pengerjaan yang diberikan sudah cukup lama, namun pelaksanaan di lapangan sangat lamban dan tidak ada alasan yang urgent. “Kalaupun mau dilanjutkan, tinggal ikut tender lagi, jadi ada kesan kelonggaran, sehingga para pelaksana kedepan dengan santai dan terkesan tidak serius menyelesaikan kerjaan,” tegasnya.

Ke depan dia meminta kepada LPSE selaku penyelenggara lelang pekerjaan, khususnya tender, untuk serius memilih dan memperhatikan pada pemenang lelang. Karena, dia mengingatkan, yang terpenting bukan soal siapa yang mendapatkan tender atau lelang proyek, tetapi siapa yang mampu menyelesaikan proyek sesuai aturan dan tepat waktu dengan hasil sesuai dengan yang direncanakan.

“Karena dengan waktu kontrak yang ada harusnya proyek tersebut bisa selesai, jangan menyalahkan alam. Kita juga tahu berapa intensitas hujan yang ada dan berapa lama hari ini panas. Kalau pelaksana dengan keterbatasan atau ketidakmampuan menyelesaikan, harus *legowo* mengakui dan tidak mencari alasan. Kalau seperti ini caranya, anggaran besar yang disediakan terkesan sia-sia, karena penyerapan dan realisasinya tidak maksimal,” tegasnya.

Dia juga berharap, pihak-pihak berwenang untuk mengecek kondisi fisik pelaksanaan pembangunan, guna memastikan dengan anggaran yang begitu besar kualitas pembangunan juga terjamin. Sehingga, harapan dia, jalan yang dibangun tidak mudah rusak dan dapat benar-benar bermanfaat

bagi masyarakat banyak. “Nanti kita minta aparat hukum atau instansi terkait mengecek mutu pembangunan, agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kualitas pembangunan,” mintanya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek peningkatan Pelang – Batu Tajam, Arif Lukman, mengatakan saat ini proyek peningkatan ruas jalan tersebut baru mencapai 70,8 persen. “Pelaksana meminta pengajuan permohonan perpanjangan yang sesuai Kepres, kita berikan kesempatan melanjutkan pekerjaan sesuai usulan pelaksana selama 50 hari ke depan, namun perpanjangan ini dikenakan denda,” katanya.

Menurutnya, jika dalam perpanjangan ini pihak pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, selain mendapatkan denda setiap hari selama masa perpanjangan, pihak pelaksana akan di-*blacklist*. “Sanksi tegas akan kita berikan jika perusahaan tidak dapat menyelesaikan. Nanti perusahaan akan kita ajukan untuk di-*blacklist*,” pungkasnya. (aft)



KETAPANGNEWS.COM

DALAM Pengerjaan: Proyek peningkatan ruas jalan Pelang – Batu Tajam yang sedang dalam pengerjaan. Sayangnya pengerjaan ruas jalan tersebut tak mampu terselesaikan hingga menjelang tutup tahun.